

PENDAMPINGAN KOMPETENSI LEGAL DRAFTING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLATIF DESA

Risma Hikmawati^{1*}, M. Bachrul
Ulum², Agus Setiawan³, Alyf Budi
Prihatama⁴, Berliana Asyifa Putri
Setiawan⁵, Ardi Mulya Prabowo⁶

¹⁾Prodi Perbandingan Madzhab,
Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
^{2,3,4,5,6)} Prodi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Article history

Received : 6 Februari 2023

Revised : 27 Maret 2023

Accepted : 20 Juni 2023

*Corresponding author

Risma Hikmawati

Email :

rismahikmawati017@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Dalam struktur pemerintahan di bawah kabupaten atau kota, Pemerintah Desa merupakan aktor penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan kebijakan di tingkat bawah. Tetapi ketercapaian pemenuhan produk kebijakan desa yang ideal sulit terwujud disebabkan perangkat desa, khususnya di Kabupaten Banyumas belum memiliki kapasitas yang sesuai seperti kapasitas dalam pengetahuan dan kompetensi *Legal Drafting*. Oleh karena itu, civitas akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaksanakan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparatur desa mengenai *legal drafting* agar pengelola desa dapat melaksanakan fungsi otonomi desa dengan lebih baik. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan kompetensi *legal drafting* dengan sasaran kegiatan merupakan aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta mengenai *legal drafting* dan penggunaannya dalam penyusunan produk hukum desa.

Kata Kunci: Pelatihan; Kompetensi Legal Drafting; Fungsi Legislasi Desa.

Abstract

In the government structure under the district or city, the Village Government is an essential factor in setting and implementing policies at the lower level. However, achieving the fulfillment of ideal village policy products is difficult to materialize because village officials, especially in Banyumas Regency, still need the appropriate capacity, such as capacity in Legal Drafting knowledge and competency. Therefore, the academic community of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto carries out community service activities aimed at increasing the understanding, knowledge, and skills of village officials regarding legal drafting so that village managers can better carry out village autonomy functions. The method used is training and legal drafting competence assistance, with the target activity being the village apparatus in Kedungwringin Village, Kec. Patikraja Kab. Banyumas and Bojongsari Village, Kec. Kembaran Kab. Banyumas. The result of this service is an increase in participants' knowledge, understanding, and skills regarding legal drafting and its use in preparing village legal products.

Keywords: Training; Legal Drafting Competence; Village Legislation Function.

Copyright © 2023 Risma Hikmawati, M. Bachrul Ulum, Agus Setiawan, Alyf Budi Prihatama, Berliana Asyifa Putri Setiawan, Ardi Mulya Prabowo

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan dibawah kabupaten atau kota, Pemerintah Desa merupakan aktor penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan kebijakan di tingkat bawah. Pemerintah Desa menjadi eksekutor utama penyelenggaraan kebijakan di tingkat desa diantaranya dengan tersedianya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalamnya. Keputusan yang dihasilkan dari kelembagaan desa meliputi keputusan-keputusan yang bersifat sosial, dan keputusan-keputusan formal yang diproduksi untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Problem sosial yang terjadi lebih tepat jika ditangani oleh hukum, sebagaimana komitmen negara hukum, bahwa kegiatan kenegaraan sebaiknya didasarkan pada hukum tetapi juga tetap berfresfektif lokal, mempertimbangkan dimensi dimana hukum tersebut dan dalam situasi serta kondisi seperti apa diberlakukan. Keputusan formal di tingkat desa bisa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES), produk keluarnya bisa berbentuk Peraturan Desa (PerDes). Aspirasi dari warga desa dapat dicapai secara maksimal jika dituangkan dan dijalankan melalui perumusan produk hukum di desa (PerDes). Dalam hal ini, BPD menjadi institusi perantara yang menghubungkan antara kebutuhan Masyarakat desa kepada Kepala Desa (Sutrisno et al., 2020)

Kabupaten Banyumas memiliki 301 desa dan 27 kecamatan (Data Statistik, 2019), angka tersebut menjadi jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yang mana otomatis memiliki wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terbanyak. Tugas desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi sebaiknya dilaksanakan melalui tahapan penggalan aspirasi, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, kemudian menyalurkan aspirasi tersebut yang telah diproses dalam bentuk lisan atau tulisan. Sayangnya, kegiatan penyaluran aspirasi oleh Desa di Kabupaten Banyumas belum maksimal. Seperti halnya ditemukan problem belum ditemukannya data tertulis yang menampung aspirasi dari masyarakat, dan belum tercovernya pengelolaan aspirasi dari masyarakat desa (Rahmawati, 2022)

Ukik Sheli Arsani, dalam penelitiannya memotret masih diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administratif, kemudian kapasitas upaya menciptakan ruang partisipatif serta kapasitas dalam merespon, mengelola permasalahan dan kritik dari masyarakat (Arsani, 2017). Penelitian lainnya menyatakan bahwa dibutuhkan peningkatan SDM perangkat desa, karena data dilapangan menunjukkan telah banyak upaya-upaya yang telah dilaksanakan pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, akan tetapi ketercapaian pengelolaan desa yang ideal sulit terwujud disebabkan, umumnya Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas belum memiliki kapasitas dalam pengelolaan desa terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, serta proses pengelolaan kebijakan publik baik dengan output hukum formal maupun informal, yang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kebijakan pemerintah agar dapat melaksanakan semua program pembangunan yang secara teknis sudah diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pamuji et al., 2017)

Salah satu penyebab minimnya kapasitas Pemerintah Desa dalam dalam tata kelola pemerintahan dapat dibagi menjadi dua sebab. Pertama kemampuan perangkat desa belum memadai dan belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang relevan, hal ini juga merupakan dampak turunan dari mekanisme perekrutan perangkat desa yang belum jelas pengaturan dan standarnya, sehingga pengelola desa dapat terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan, dan berbagai kalangan. Kedua kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyediaan dan pengawasan pelatihan bagi perangkat desa (Indranika et al., 2020). Kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan desa diantaranya adalah kompetensi manajerial (kompetensi manajemen untuk mencapai kinerja yang lebih efektif), kompetensi sosio kultural (kemampuan yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat melingkupi etika, moral, nilai budaya dan agama), dan kompetensi teknis (kompetensi yang berfokus pada pengelola yang memiliki keahlian di tempat dan bidang yang tepat).

Pengetahuan *Legal Drafting* merupakan salah satu kompetensi dalam lingkup kompetensi teknis bagi lembaga di desa untuk memenuhi fungsi legislatif desa (Sobandi & Sulaiman, 2010). Kebutuhan produk legal bagi desa sangat diperlukan yang pada saat ini desa telah memiliki otonomi dalam merancang peraturan desa, membahas dan menetapkan serta melakukan sosialisasi PerDes kepada masyarakat (Misbahuddin, 2010). Hal ini juga didasarkan pada kebutuhan tersedianya peraturan desa sebagai respon dan amanat untuk mengakomodir kebijakan dari pusat, atau respon terhadap berbagai persoalan dalam lingkup desa yang membutuhkan diterbitkannya peraturan desa.

Setelah dilakukan analisis literatur, bahwa terdapat beberapa penelitian serupa, diantaranya penelitian berjudul "Analisis Yuridis Sosiologis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kerangka Otonomi Desa" (Studi Di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), menyoroti fungsi legislasi di Desa, dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini melakukan riset dengan pendekatan yuridis sosiologis (Misbahuddin: 2010). Selanjutnya, Penny Pitri Nurmalasari dalam "Formulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)" (Studi Tentang Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas), menganalisis proses formulasi pendirian BUM Desa melalui penyusunan Perdes BUM Desa di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas (Nurmalasari, 2017). Kemudian penelitian lainnya membahas tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana peneliti melakukan penafsiran dan membangun logika dari data yang ada baik berupa lisan dan tindakan informan maupun dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan. (Arsani, 2017)

Penelitian Kadar Pamuji yang dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Banyumas juga memiliki lingkup seputar penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan legislatif didalamnya. Metode penelitian yang digunakannya adalah yuridis empiris, sehingga tidak merupakan sebuah program pengembangan kapasitas untuk menjawab permasalahan yang ada (Pamuji et al., 2017). Penelitian Devit Bagus Indranika dkk, menyoroti keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan dasar otonomi desa menjadi sorotan sebuah penelitian, yang akhirnya mempertanyakan fenomena kompetensi yang dimiliki pemerintah Desa. Kewenangan dan urusan yang harus dikelola desa semakin kompleksnya akan tetapi belum diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa (Indranika et al., 2020). Selanjutnya penelitian berjudul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas" yang disusun oleh Ratna Komala. (Komala, 2017), masih pada analisis fungsi legislasi di Desa, bukan pada pelaksanaan *problem solving*. Dalam hasil penelitian Ratna Komala ini, fungsi legislasi Desa di Kabupaten Banyumas disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD, dalam membentuk/membuat Peraturan masih lemah, terutama dikarenakan belum memiliki SDM berkemampuan teknis yang mencukupi.

Terdapat pula penelitian lain yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola kearsipan dalam mendukung pelayanan administrasi pada kantor desa di Kecamatan Sumbang Banyumas memiliki *term* dalam lingkup fungsi legislasi pemerintah desa, akan tetapi dalam metodenya berfokus kepada bagaimana mengetahui proses pengelolaan arsip di Desa (Abriani et al., 2018). Penelitian lainnya oleh Noer Indriati dkk, berfokus pada analisis indikator yang mempengaruhi terlaksananya fungsi legislasi desa, dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa salah satu indikator terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi adalah pelibatan masyarakat, akan tetapi hasil riset menunjukkan masih belum optimalnya aksi keterlibatan masyarakat dalam bidang legislatif, kegiatan pemilu adalah salah satu kegiatan partisipasi masyarakat yang paling kentara, sedangkan dalam kegiatan lainnya relatif masih belum terakomodir (Indriati et al., 2019).

Fenomena Kabupaten Banyumas yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri yang tinggi, yakni menduduki peringkat keenam di Jawa Tengah, berimplikasi pada timbulnya banyak kasus buruh migran, dan salah satunya perlu penanganan dan penerbitan produk hukum dari desa, dinyatakan dalam penelitian berjudul "Penyusunan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Mewujudkan Desa Sebagai Basis Migrasi Aman Di Kabupaten Banyumas", memperlihatkan salah satu urgensi perlunya kompetensi Legal Drafting bagi komponen pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas (Pamuji et al., 2017). Terakhir, penelitian yang ditulis oleh Ika Ariani Kartini, dengan judul "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan *Legal Drafting* (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", merupakan sebuah tinjauan tentang pelaksanaan *Legal Drafting* (Kartini. 2018).

Dari beberapa penelitian di atas, belum terdapat kegiatan yang memotret upaya peningkatan kompetensi aparatur desa dalam bidang legal drafting, akan tetapi bahkan diantaranya menguatkan bahwa

diperlukannya tindak lanjut berupa perlunya pendampingan kompetensi Legal Drafting di Desa. Oleh karena itu, civitas akademika Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, berupaya melakukan pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting bagi aparatur desa Kab. Banyumas. Harapannya, pelatihan dan pendampingan ini dapat mendorong pengelolaan desa yang lebih profesional. Selain bermanfaat bagi aktualisasi dan implementasikan keilmuan program studi, juga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa di Kabupaten Banyumas tentang pentingnya kompetensi legal drafting dalam melaksanakan otonomi desa dan kebutuhan pelaksanaan rumah tangga desa. Tujuan dari program pendampingan ini adalah: 1) Mengaktualisasi dan mengimplementasikan keilmuan program studi dan 2) Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan aparatur desa di Kabupaten Banyumas dalam kompetensi legal drafting.

METODE PELAKSANAAN

Kebutuhan akan kompetensi *Legal Drafting* pada Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas, dapat dijawab dengan pelaksanaan pendampingan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Riset yang digunakan adalah pemetaan masalah terhadap problem yang dihadapi di Desa dari berbagai prespektif lokal. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk memformulasikan cara yang tepat agar pelaksanaan pendampingan lebih efektif. Kegiatan pemetaan awal ini, berkelanjutan atau termasuk dengan kegiatan koordinasi untuk menumbuhkan kepercayaan, dan komitmen bekerja bersama dengan tujuan dan cita-cita yang selaras, demi kepentingan, kebutuhan dan keuntungan semua pihak (Partisipatif). (Andriany, 2015).

Setelah mendapatkan pemetaan, maka disimpulkan pemecahan masalah atau solusi untuk perubahan lebih baik, menyusun strategi gerakan dengan analisis SWOT, dan kemudian melancarkan aksi perubahan. Terakhir dilakukan refleksi, sebagai evaluasi keberhasilan program. *Capacity Building* adalah aksi yang akan ditawarkan, dalam memecahkan masalah kebutuhan kompetensi Legal Drafting dalam pengelolaan Desa, yakni untuk Desa menjalankan fungsi legislasinya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian, meliputi pelatihan dan pendampingan kompetensi *legal drafting* melalui metode partisipatif dan praktik yang dilaksanakan selama 3 kali pertemuan di bulan September-Desember 2022, dengan sasaran aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas. Pengabdian dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting ini mencakup: a) Kegiatan FGD *legal drafting* dan b) Pelatihan dan pendampingan *legal drafting*.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan kompetensi *Legal Drafting* terhadap Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas dilaksanakan kepada aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas, dengan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan FGD Legal Drafting

Kebutuhan akan kompetensi Legal Drafting pada Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas, diawali dengan identifikasi masalah awal melalui metode PAR (*Participatory Action Research*). Pemetaan masalah terhadap problem yang dihadapi di Desa dari berbagai prespektif local diharapkan mampu menguatkan komitmen peserta dalam mengikuti pendampingan, diharapkan juga mampu memberikan gambaran untuk memformulasikan cara yang tepat agar pelaksanaan pendampingan lebih efektif. Kegiatan pemetaan awal ini, merupakan koordinasi untuk menumbuhkan kepercayaan, dan komitmen bekerja bersama dengan tujuan dan cita-cita yang selaras, demi kepentingan, kebutuhan dan keuntungan semua pihak (Partisipatif).

Dari pemetaan awal ini ditemukan bahwa: *pertama* belum pernah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan kompetensi *legal drafting* kepada para aparatur desa sehingga aparatur desa tidak populer dengan istilah *legal drafting*, pengetahuan, apalagi kompetensi *legal drafting*; *kedua*, dalam menyusun kebijakan desa, aparatur desa biasanya menyalin format kebijakan desa dari internet dan mengeditnya sesuai kebutuhan. *Ketiga*: Terdapat kebingungan aparatur desa dalam menyusun beberapa peraturan desa yang unik, seperti kebijakan yang mengatur perjanjian sewa menyewa antara desa dengan pihak lain.

Setelah mendapatkan pemetaan, maka disimpulkan pemecahan masalah atau solusi untuk perubahan lebih baik, menyusun strategi gerakan dengan analisis SWOT, dan kemudian melancarkan aksi perubahan. Terakhir dilakukan refleksi, sebagai evaluasi keberhasilan program. *Capacity Building* adalah aksi yang ditawarkan, dalam memecahkan masalah kebutuhan kompetensi *Legal Drafting* dalam pengelolaan Desa, yakni untuk Desa menjalankan fungsi legislasinya, dan disepakai oleh peserta pendampingan.



Gambar 1. Peserta mengikuti kegiatan FGD Legal Drafting bagi Aparatur Desa di Kab. Banyumas.

Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi untuk pengumpulan data dengan cara meminta tanggapan terhadap permasalahan kompetensi *Legal Drafting* Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas yang dilanjutkan dengan pendampingan *Legal Drafting* bagi Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dalam yang berisi pelatihan intensif dengan metode partisipatif dan praktik.

Pelaksanaan Pendampingan Legal Drafting ke Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan ke Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja

Pendampingan penyusunan peraturan Desa (Perdes) sebagai upaya penguatan kapasitas desa dimaksudkan bahwa desa memiliki dasar hukum dalam pengelolaan rumah tangga desa dan pelaksanaan fungsi legislatif desa. Berikut merupakan proses pendampingan: 1) Identifikasi kemampuan awal peserta; 2) Penyampaian materi *legal drafting* secara teori; 3) Latihan Implementasi & pendalaman materi *legal drafting*; 4) Bedah hasil latihan Implementasi & pendalaman materi *legal drafting*.



Gambar 2: Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Legal Drafting bagi Aparatur Desa di Kab. Banyumas.

Adapun tahapan pemberian materi adalah sebagai berikut: 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan produk hukum desa; 2) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan penyusunan produk hukum desa; 3) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang teknis pembuatan hukum desa beserta peraturannya (Wardiyanto et al., 2016).

Legal Drafting/Legislative Drafting ditinjau dari aspek materi, aspek sarana dan prasarana, serta aspek peserta dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Aspek Materi:

Pemilihan materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan sekaligus dijadikan sebagai media sosialisasi peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa yang terbaru, seperti UU Desa yang baru efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2015 (Irawan, 2017). Penyampaian materi terbagi kedalam tiga sesi, yang diakhiri dengan kuis maupun simulasi kelompok pada setiap sesinya. Agar tidak membosankan dan dapat disajikan lebih menarik, penyampaian materi dilakukan secara dialogis juga dengan menayangkan tayangan yang relevan. Setelah materi pelatihan disampaikan dilakukan simulasi kepada peserta pelatihan dengan mencoba menganalisa sejumlah peraturan desa yang telah berlaku dan ada sebelumnya, terutama dari perspektif hukum serta penulisan dan pemilihan kata menurut Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai tugas terakhir pelatihan, masing-masing kelompok diwajibkan menyusun draft contoh peraturan desa yang kelompok pandang perlu diadakan pengaturannya secara garis besar.

b) Aspek Sarana dan Prasarana:

Sarana dan fasilitas pelatihan cukup menunjang suasana pelatihan sehingga peserta mampu memahami materi yang disampaikan narasumber dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan setiap pemberian tugas dan pertanyaan dari tim dapat diselesaikan dengan baik oleh peserta pelatihan atau masing-masing kelompok. Antusiasme peserta pelatihan juga sangat nampak pada saat setiap kelompok harus melakukan presentasi tugas akhirnya yang berupa penyampaian gagasan, ide tentang draft peraturan desa. (Sumber-Sumber Informasi Pengembangan Masyarakat Pedesaan (DB 1), DitjenNak / DELIVERI: 2000)

Pendampingan Naskah Legal Drafting Dalam Kebutuhan Desa.

Tim pengabdian dari prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, berusaha mengkonfirmasi riwayat produk hukum dalam kebutuhan desa, bagaimana implementasinya serta melakukan dampingan dengan memberikan pengetahuan mengenai penyusunan produk hukum desa yang baik. Sebagaimana hasil pengumpulan data awal, diketahui bahwa Desa Bojongsari begitu pula Desa Kedungwringin belum mendapatkan pelatihan *legal drafting*, sehingga ketika Menyusun peraturan desa mencontoh dari peraturan desa dengan format yang telah ada, ada beberapa kendala, yakni dalam penyusunan peraturan desa atau produk hukum desa yang spesifik agak sulit seperti perjanjian sewa-menyewa, karena kekurangan kompetensi aparatur desa.



Gambar 3. Kegiatan konfirmasi riwayat produk hukum dalam kebutuhan desa.

Pelatihan yang sudah didapatkan sebelumnya oleh aparatur desa adalah pelatihan administratif umum, adapun peraturan desa yang biasa di dapatkan di dua desa rata-rata sama sekitar 40 produk hukum desa

per-tahun, dengan produk yang umum, yakni pengaturan keuangan, ketertiban, kesehatan, dsb. Aparatur desa selanjutnya mengharapkan dilaksanakannya kembali pelatihan dan pendampingan *legal drafting* yang lebih intens.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tim lakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kompetensi *legal drafting*, maka beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan pada pendampingan ini yaitu, pertama pemahaman peserta pelatihan yang terdiri atas unsur Perangkat Desa (executive) dan BPD (legislative) sebagai pembentuk peraturan desa menjadi meningkat. Dimana sebelumnya peserta asing dengan istilah legal drafting, tidak pernah mendapatkan pengetahuan *legal drafting*, dan tidak memahami penyusunan *legal drafting* yang sesuai peraturan, ketiga hal tersebut berubah dimana setelah pelatihan peserta mulai mengetahui dan memahami keilmuan legal drafting, serta memahami standar penyusunan kebijakan desa berdasarkan standar *legal drafting* yang baik dan benar. Kedua, bahwa keterampilan Perangkat Desa (executive) maupun BPD (legislative) dalam menyusun draft peraturan desanya cukup meningkat. Dimana sebelum pelatihan, perangkat desa dan BPD setempat dalam membuat *legal drafting* tidak memiliki kecenderungan untuk memverifikasi ketepatan kebijakan yang dibuat. Setelah pelatihan, dengan diperlihatkannya standar penyusunan kebijakan desa beserta aturan-aturannya, perangkat desa telah memahami langkah verifikasi kebijakan desa yang disusunnya. Adapun hambatan yang dialami selama pengabdian adalah terbatasnya waktu, SDM, dan dana yang diperuntukkan bagi pelatihan ini sehingga belum dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Kegiatan Pengabdian secara umum sudah terlaksana, dengan proses pendampingan yang dapat dijadikan bahan analisis dalam penerapan di masing-masing Desa. Semoga kedepannya pelatihan *legal drafting* dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama PEMDA setempat juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami haturkan kepada LPPM UIN SAIZU Purwokerto yang telah mendanai pengabdian berbasis prodi dan terintegrasi KKN ini, juga kepada segenap pimpinan Fak. Syariah UIN SAIZU Purwokerto, serta desa mitra pengabdian yakni Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas dan Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas.

PUSTAKA

- Abriani, N., Anggorowati, A., & Wardani, N. P. (2018). Tata Kelola Arsip Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam Mewujudkan Tertib Arsip Desa. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.22146/khazanah.41536>
- Andriany, Dewi. (2015). "Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup". Posiding Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang SNEMA-2015 Padang-Indonesia. ISBN: 978-602-17129-5-5
- Arsani, U.S. (2017). "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas)". Tesis Program Studi S2 Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta . Diakses 10 Agustus 2022. [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/)
- Indranika, D. B., Puspita, D. R., & Faozanudin, M. (2020). KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217>

- Indriati, N., Taufiq, M., & Wismaningsih, W. (2019). SIKAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.111>
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa era UU Desa (1st ed.)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kartini, I. A. (2018). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2336>
- Komala, R. (2017). "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Skripsi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara
- Rahmawati, Y. (2022). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah". Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bandung. Hal 1-10.
- Pamuji, K., Ardhanariswari, R., Nasihuddin, A. A., Supriyanto, S., & Sukirman, S. (2017). PENGEMBANGAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 625–643. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6>
- Sobandi, K. R., & Sulaiman, A. I. (2010). KOMPLEKSITAS BUDAYA POLITIK AKAR RUMPUT DAN PROSPEK DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah). *JIPP: Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 239–254. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/KRSAIS>
- Sutrisno, E., Artadi, I., Khafdilah, K., & Widiyanti, H. (2020). FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. *Yustitia*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.96>
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martono, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa (1st ed.)*. Surabaya : Airlangga University Press.

Format Sitasi: Hikmawati, R., Ulum, M.B., Setiawan, A., Prihatama, A.B., Setiawan, B.A.P. & Prabowo, A.M. (2023). Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 4(2): 1008-1015. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))